



## BAB I PENDAHULUAN



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis finansial yang telah terjadi di beberapa negara maju seperti Uni-Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 2008 lalu, salah satunya disebabkan oleh pengelembungan perkreditan perumahan di tahun 2006, yang akhirnya pecah dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi dan perbankan juga turut bertanggungjawab menyebabkan terjadinya krisis ini, termasuk di dalamnya, sistem penyajian laporan keuangan yang hingga kini dianggap kontroversial, yaitu penyajian menggunakan nilai wajar (European Commission, 2013).

Menyikapi krisis tersebut, pada tahun 2009 International Accounting Standard Board (IASB) dan Financial Accounting Standard Board (FASB) segera bertindak selanjutnya dengan membentuk grup penasihat khusus untuk menyelidiki dan mencegah krisis selanjutnya yaitu Financial Crisis Advisory Group (FCAG). Sektor yang menjadi perhatian utama untuk dianalisa terpusat pada tiga kategori berikut, yaitu penyajian laporan keuangan, pengukuran menggunakan nilai wajar, dan instrumen finansial. Salah satu metode yang digunakan FCAG adalah dengan meminta tanggapan dari berbagai pihak yang relevan seperti regulator, lembaga penasihat keuangan, lembaga perbankan, hingga lembaga akuntan publik menggunakan kuesioner. Dari tanggapan yang diberikan, didapatkan dua pandangan yang jelas dan bertolak belakang atas pengaruh akuntansi nilai wajar terhadap krisis yang terjadi, yaitu sebagai penyebab krisis atau justru berperan positif, jika memang ada pengaruhnya, dalam menyelesaikan krisis tersebut. (Financial Accounting Standard Board, 2009)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam tanggapan kuesioner tersebut, mayoritas responden yang pro terhadap penetapan akuntansi nilai wajar memandang bahwa pengaruhnya hanya berperan secara tidak langsung dan tidak sepatasnya dijadikan kambing hitam atas krisis yang terjadi. Bahkan mereka mengungkapkan bahwa sifat akuntansi nilai wajar yang sangat netral dan transparan dalam menyediakan informasi dapat membantu investor mengetahui resiko atas suatu perusahaan. Walaupun setuju dengan hal tersebut, pihak yang menyalahkan akuntansi nilai wajar mendasarkan opininya pada subjektivitas yang dapat terjadi saat pasar kurang aktif seperti pada saat krisis. Mereka menyebutkan bahwa spekulasi atas harga-harga yang mempersulit penetapan dasar untuk menilai sesuatu secara wajar dalam kondisi tersebut. Hal ini sebaliknya dianggap mempunyai dampak nyata terhadap dunia ekonomi (Financial Accounting Standards Board, 2009; Financial Crisis Advisory Group, 2009).

Secara teoritis, akuntansi nilai wajar mulanya didefinisikan dalam Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 157 yang dikeluarkan FASB tahun 2006 sebagai harga yang akan diterima atas penjualan aset atau yang dibayar untuk memindahkan kewajiban dalam transaksi reguler antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dengan ditetapkannya definisi tersebut para penyusun standar berharap agar akuntansi nilai wajar dapat semakin dekat dan transparan menggambarkan kondisi dan situasi perusahaan, baik kinerja, nilai aset dan segala bentuk risiko yang dimilikinya. Masalahnya, penerapan akuntansi nilai wajar oleh sebagian pihak tidak hanya dianggap sulit dan mahal, namun juga bersifat subjektif sehingga kurang dapat diandalkan (Benston, 2008). Power (2010) juga menemukan bahwa penggunaan akuntansi nilai wajar memiliki permasalahan subjektivitas yang tinggi dan meningkat untuk kategori level 2 dan level 3. Sulitnya memperkirakan apakah suatu aspek termasuk level 2 atau 3 menjadi celah untuk semakin meningkatnya subjektivitas. Sebelumnya, Penman (2007) telah mengungkapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kelemahan ini. Ia juga menambahkan bahwa ada permasalahan serius dalam akuntansi nilai wajar yang seharusnya menyajikan nilai wajar secara menyeluruh untuk aset maupun liabilitas karena keterkaitannya. Maksudnya adalah ketika aset diukur menggunakan nilai wajar, liabilitas yang terkaitpun harus diukur juga dengan nilai wajar untuk memberikan informasi yang relevan. Contohnya dalam hal pinjaman, penurunan nilai aset akibat penurunan profitabilitas perusahaan selalu juga disertai penurunan nilai hutang obligasinya. Dalam akuntansi nilai wajar, penurunan nilai hutang obligasi tadi akan dicatat sebagai keuntungan, namun penurunan nilai aset perusahaan yang terjadi bersamaan dengannya tidak dicatat karena sulitnya mengukur aspek profitabilitas seperti *customer relation*. Hal ini dapat mengakibatkan *overstated* dan ketidakstabilan laba perusahaan.

Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, FASB dan IASB mengeluarkan serangkaian aturan tambahan untuk pencatatan keuntungan atau kerugian nilai wajar, yaitu SFAS 159 tahun 2007 dan IAS 39 tahun 2004 mengenai *Fair Value Option*. Aturan-aturan ini kemudian disempurnakan dan disepakati FASB dan IASB untuk disatukan menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 yang baru disahkan versi finalnya pada tahun 2015 ini dan IFRS 13: Fair Value Accounting yang akhirnya disahkan pada tahun 2011. Berbeda dengan IFRS 9 yang terus direvisi karena terdapat kontroversi atas penerapannya, IFRS 13 telah stabil mulai diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68: Pengukuran Nilai Wajar yang direncanakan efektif tahun 2015 ini.

*Fair Value Option* memberikan perusahaan kesempatan untuk mengurangi efek ketidakstabilan laba yang disebabkan oleh pengukuran yang berbeda tersebut tanpa harus menerapkan ketentuan *hedge accounting* yang kompleks. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan atas penerapan akuntansi nilai wajar berkurang dan mampu mencakup lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dalam ke aspek keuntungan atau kerugian nilai wajar liabilitas (SFAS 159, 2007). Hal ini didukung oleh penelitian Fiechter (2011) yang menemukan bahwa aturan ini mampu memenuhi kegunaan utamanya, yaitu mengurangi ketidakcocokan akuntansi yang sebelumnya diungkap Penman (2007) serta mampu merelfeksikan risiko pasar dengan lebih baik (Hodder et al., 2006). Walaupun demikian, Song (2008) menemukan bahwa aturan ini justru menimbulkan banyak dampak yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan kelonggaran dalam hal menentukan provisi yang diijinkan FAS 159.

Lebih lanjut, Ow Yong et al. (2012) menemukan bahwa pengakuan keuntungan dan kerugian atas nilai wajar liabilitas *fair value option* dilihat pelaku pasar sebagai laba ekonomis. Inilah yang kemudian diasumsikan turut berperan atas krisis finansial yang terjadi, yaitu dengan tercatatnya laba yang lebih besar karena adanya pengakuan keuntungan liabilitas, terutama pada institusi keuangan. Ia menetapkan institusi keuangan sebagai fokus penelitiannya karena sektor inilah yang awalnya memicu munculnya krisis (karena tingginya kepemilikan aset dan liabilitas keuangan yang menyebabkan *overstated* laba secara signifikan). Mempertegas hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pasar sulit memahami implikasi risiko perubahan nilai wajar liabilitas perusahaan (Synor et al. 2011; Koonce et al. 2011), penelitian Ow Yong et al. (2012) secara nyata mampu membuktikan adanya relevansi nilai atas perubahan nilai wajar liabilitas. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar keuntungan atau kerugian nilai wajar liabilitas tersebut didominasi oleh perubahan peringkat kredit perusahaan.

Sebaliknya, penelitian Barth et al. (2008) menemukan bahwa pencatatan keuntungan atau kerugian nilai wajar dari perubahan risiko kredit tidak menimbulkan *overstated* laba. Dengan membalik model Merton (1974), ia menemukan bahwa sebenarnya pencatatan keuntungan (kerugian) nilai wajar perubahan risiko kredit hanya



akan mengurangi penurunan (peningkatan) nilai aset perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain seperti inefisiensi pasar, perjanjian hutang, solvabilitas, dan lainnya yang menyebabkan model tersebut tidak menggambarkan situasi asli pasar. Memang jika pasar bertindak sesuai model Merton (1974), maka seharusnya keuntungan atas nilai wajar liabilitas tersebut jauh lebih tinggi daripada penurunan aset perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan nilai aset dan liabilitas, baik tangible maupun intangible, seperti yang sebelumnya diungkapkan Penman (2007). Pencatatan keuntungan karena penurunan peringkat kredit merupakan akibat atas berkurangnya nilai aset perusahaan, termasuk aset *intangible*-nya. Oleh karena itu, keuntungan ini hanya bersifat menyeimbangkan penurunan nilai aset *intangible* yang ada.

Penelitian Barth et al. (2008) adalah penelitian pertama yang memprediksi dan menemukan kemungkinan adanya pengaruh atas besarnya hutang yang mampu memitigasi dampak perubahan risiko kredit. Dengan demikian, ia membuktikan bahwa penerapan fair value option, khususnya untuk keuntungan atau kerugian nilai wajar atas perubahan risiko kredit, seharusnya tidak dipermasalahkan, apalagi sebagai penyebab krisis lalu. Kesimpulan Barth et al. (2008) tersebut juga sesuai dengan temuan Kliger dan Sarig (2000) dan Choy et al. (2006) mengenai respon pasar yang hanya muncul saat terjadi perubahan peringkat kredit di luar ekspektasi, terutama saat penurunan. Artinya, pasar terbukti bertindak tidak persis sesuai model Merton (1974).

Kontroversi inilah yang membuat *fair value option* sulit diterima secara global, sehingga membuat IFRS 9 terus direvisi hingga tahun 2014 lalu. Dalam versi terakhirnya di tahun 2014, IFRS 9 akhirnya menyertakan pengaturan untuk *own credit* seperti yang sebelumnya diteliti Barth et al. (2008). Di Indonesia sendiri, IFRS 9 hingga tahun 2015 belum diadopsi. Walaupun demikian, penggunaan peringkat kredit dalam penilaian nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajar liabilitas sebenarnya sudah direncanakan mulai diterapkan efektif tahun 2012 kemarin melalui PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar* (Suharto, 2009). Dalam PSAK 68 nanti, reputasi kredit, yang sebagian dapat diamati melalui peringkat kredit, menjadi berpengaruh untuk menentukan nilai wajar suatu liabilitas (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2014).

Peringkat kredit diberikan dalam bentuk klasifikasi oleh Lembaga Pemeringkat Kredit. Tahun 2011 lalu Bank Indonesia melalui surat edaran No. 13/31/DPNP dan publikasinya menetapkan enam lembaga pemeringkat efek yang diakui yaitu Fitch Ratings, Moody's Investor Service, Standard and Poor's, PT Fitch Ratings Indonesia, PT ICRA Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia. Peringkat kredit yang diberikan berbeda-beda tergantung lembaga pemeringkatnya berkisar antara 19 hingga 21 klasifikasi peringkat. Secara umum klasifikasi peringkat dimulai dari AAA, AA+, AA, dan seterusnya hingga D (Bank Indonesia, 2011 melalui <http://www.bi.go.id/>). Secara berkala peringkat kredit ini akan kembali dievaluasi dan diperingkat ulang sehingga dapat mengalami perubahan berupa peningkatan maupun penurunan. Perubahan inilah yang utamanya memicu kontroversi relevansi nilai atas keuntungan atau kerugian nilai wajar liabilitas dalam IFRS 9, terutama pada institusi keuangan.

Berlandaskan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali relevansi nilai dari perubahan risiko kredit yang terjadi akibat penerapan akuntansi nilai wajar (PSAK 68) terkait dengan hutang yang dimiliki perusahaan, khususnya institusi keuangan, di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung hasil penelitian terdahulu dengan memberi tambahan bukti empiris serta sebagai tambahan masukan untuk penetapan standar Indonesia tentang gambaran dampak pencatatan nilai wajar atas perubahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



risiko kredit dalam IFRS 9 yang kemungkinan dalam waktu dekat juga akan dikonvergensi ke dalam PSAK.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian ini diartikan sebagai berikut:

1. Apakah akuntansi nilai wajar mampu memproyeksikan risiko yang lebih luas dalam laporan laba?
2. Apakah keuntungan atau kerugian atas nilai wajar liabilitas memiliki relevansi nilai?
3. Apakah perubahan risiko kredit memiliki relevansi nilai?
4. Apakah besarnya hutang yang dimiliki institusi keuangan memiliki relevansi nilai?
5. Apakah besarnya hutang yang dimiliki institusi keuangan mempengaruhi relevansi nilai dari perubahan risiko kredit?

## C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan bahasan masalah yang mungkin muncul dari topik tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Apakah perubahan risiko kredit memiliki relevansi nilai?
2. Apakah besarnya hutang yang dimiliki institusi keuangan mempengaruhi relevansi nilai dari perubahan risiko kredit?

## D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada institusi keuangan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memiliki peringkat risiko kredit yang diakui



Bank Indonesia. Periode pengamatan penelitian dibatasi selama tiga tahun mulai tahun 2011-2013.

### E. Rumusan Masalah

Masalah utama yang dapat dirumuskan dari uraian di atas adalah “Apakah perubahan risiko kredit memiliki relevansi nilai yang dipengaruhi besarnya hutang yang dimiliki perusahaan institusi keuangan?”

### F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Relevansi nilai dari perubahan risiko kredit.
2. Pengaruh besarnya hutang yang dimiliki institusi keuangan terhadap relevansi nilai dari perubahan risiko kredit.

### G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Investor dan kreditor  
Memberikan tambahan masukan tentang dampak yang ditimbulkan oleh perubahan risiko kredit terhadap perubahan nilai investasi saham yang dipengaruhi perilaku pasar terhadap besarnya hutang yang dimiliki institusi keuangan.
2. Penetap standar  
Memberikan tambahan masukan tentang dampak dan aplikasi penerapan penilaian keandalanabilitas menggunakan risiko kredit oleh IFRS 13 dan IFRS 9 nanti, khususnya tentang aspek kontroversial yang sempat memicu perdebatan dengan menguraikan pengaruh



perilaku pasar Indonesia terhadap perubahan peringkat kredit institusi keuangan dan besarnya hutang yang dimilikinya.

3. Para peneliti

Memberikan tambahan bukti empiris untuk penelitian sejenis lebih lanjut tentang relevansi nilai yang ditimbulkan oleh perubahan risiko kredit dan kaitannya dengan besarnya hutang yang dimiliki institusi keuangan di pasar Asia, khususnya Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.